

---

# HUBUNGAN DEMOKRASI DAN BISNIS MENURUT FAHAM NEOLIBERAL DAN DEMOKRASI SOSIAL: SEBUAH PENGANTAR

---

Oleh Rustam Ibrahim<sup>1</sup>

**K**alaupun pada modul-modul yang lalu telah dibicarakan pengertian-pengertian dasar tentang demokrasi seperti konsepsi, pemikiran dan prakteknya, maka mulai hari ini dibahas kaitan antara bisnis dengan demokrasi. Hubungan antara demokrasi dan bisnis akan difokuskan di negara-negara demokrasi yang menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal maupun saingannya yang disebut dengan negara demokrasi sosial atau negara kesejahteraan (*welfare state*).

Untuk pengantar ini akan dipergunakan paradigma peran tiga serangkai atau model tiga sektor yang saling berhubungan dan mempengaruhi perkembangan masyarakat. Yaitu negara (*state*), pasar/bisnis (*market*) dan masyarakat sipil (*civil Society*).

*Negara* adalah organisasi kekuasaan yang mempunyai kewenangan mengatur setiap anggota masyarakat melalui hukum dan perundang-undangan (regulasi). Menurut teori demokrasi, negara itu didirikan dan memperoleh kedaulatannya berdasarkan persetujuan rakyat yang diatur dalam suatu perjanjian atau kontrak (*social contract*) dalam bentuk konstitusi atau undang-undang dasar. Secara universal negara didirikan untuk melindungi dan melayani warganya dengan menciptakan keamanan, ketertiban, hukum dan keadilan, kesejahteraan masyarakat serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Hal ini dilakukan oleh negara melalui undang-undang, peraturan dan berbagai kebijakan lainnya serta dengan menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk melaksanakan fungsinya maka negara mempunyai alat-alat kelengkapan seperti eksekutif (pemerintah), legislatif, yudikatif, aparat keamanan dan pertahanan (polisi, militer, intelijen) dan juga birokrasi (pegawai negeri).

*Pasar* atau bisnis merupakan arena untuk memperoleh penghasilan dan kekayaan bagi anggota-anggota masyarakat. Perolehan ini dicapai melalui produksi serta pertukaran barang dan jasa. Lembaga-lembaga yang termasuk ke dalam kategori pasar/bisnis ini

disebut dunia usaha yang mencakup mulai dari: usaha kecil dan menengah (UKM), perusahaan besar, konglomerat, perusahaan multinasional, lembaga keuangan dan perbankan, pasar modal, dan sebagainya.

Dengan masyarakat sipil (*civil society*) didefinisikan sebagai wilayah, arena atau ruang kehidupan sosial di luar keluarga, negara dan pasar di mana individu-individu berorganisasi atau berkelompok untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Masyarakat sipil ini mewujud ke dalam berbagai bentuk organisasi dan kelompok seperti: lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok swadaya masyarakat (KSM), Orsos, Ormas, organisasi profesi, organisasi keagamaan, serikat buruh, gerakan sosial, dan lain-lain.

Organisasi-organisasi di dalam masyarakat sipil dapat membantu individu warga negara untuk mendapatkan kebutuhan atau menyalurkan aspirasinya yang tidak dapat dipenuhi atau dipuaskan baik oleh negara mau pun oleh pasar. Kalau organisasi-organisasi bisnis menghasilkan modal keuangan (*financial capital*) yang diperoleh melalui pertukaran barang dan jasa yang diatur oleh pasar, maka organisasi masyarakat sipil menghasilkan apa yang disebut dengan modal sosial (*social capital*). Seorang ahli sosiologi Robert Putnam merumuskan modal sosial dalam bentuk norma-norma seperti saling percaya (*mutual*

*trust*), keuntungan timbal-

balik (*mutual benefit*),

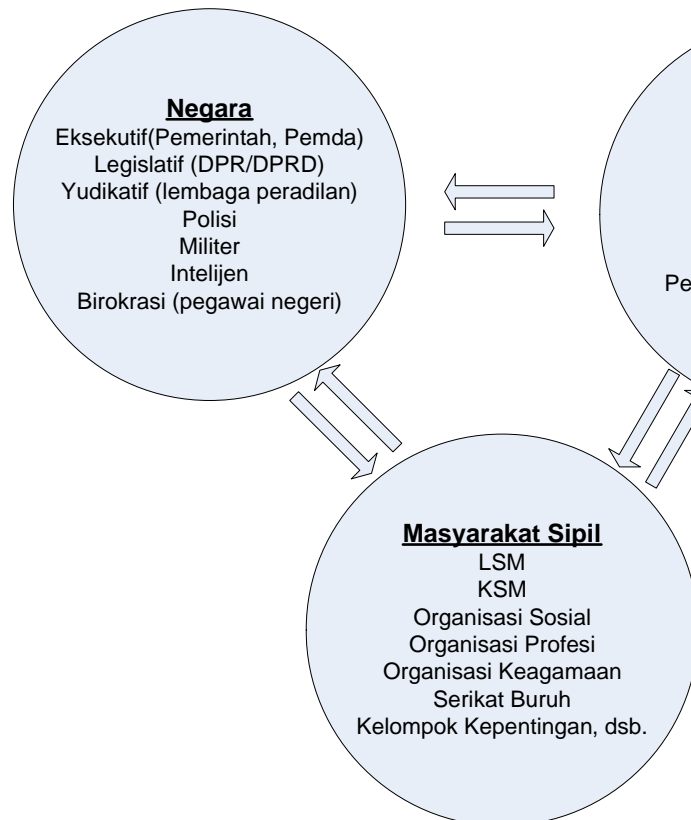
kerjasama, toleransi dan solidaritas; yang kesemuanya

merupakan hal-hal yang sangat esensial bagi

berfungsinya demokrasi moderen.<sup>2</sup>

Dengan perkataan lain masyarakat sipil dapat membuat demokrasi bekerja dengan baik.

Hubungan atau interrelasi dan interaksi antara negara, pasar/bisnis dan masyarakat sipil dapat berubah dari waktu ke waktu yang terutama



Gambar 1 Model tiga sektor dalam perkembangan masyarakat

tergantung dari sejauhmana intervensi negara ke dalam kehidupan ekonomi dan masyarakat. Di negara-negara demokrasi yang menghargai pluralisme dalam masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat sipil dapat tumbuh dan bahkan dapat berkembang menjadi kekuatan-kekuatan pengimbang terhadap negara dan pasar/bisnis dengan melakukan pengawasan terhadap negara dan pasar/bisnis dari kecenderungan buruknya. Masyarakat sipil yang kuat akan mampu melindungi rakyat atau warga negara terhadap kecenderungan kesewenang-wenangan negara, tetapi juga berpartisipasi dalam upaya mencapai kebaikan bersama (*common good*) dengan selalu mengupayakan atau mendesak negara memainkan perannya dalam pencapaian tujuan kebaikan bersama ini.

### **Hubungan demokrasi dan bisnis menurut faham neoliberal**

Neoliberalisme atau faham liberal baru mengandung pengertian sebagai kebangkitan kembali faham liberal yang berbeda atau merupakan modifikasi dari faham liberal yang tradisional. Sebagaimana diketahui liberalisme mempunyai dua ciri pokok: kapitalisme pasar bebas dan hak-hak individu.<sup>3</sup> Sebagai konsep yang lengkap liberalisme adalah suatu ideologi politik (dan ekonomi) yang tujuan utamanya adalah menyebarkan dan mempertahankan gagasan demokrasi konstitusional dengan membatasi peran pemerintah, kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia (HAM). Menurut faham liberal kebebasan individu dan HAM merupakan instrumen yang harus ada untuk dapat hidup sebagai manusia yang baik.

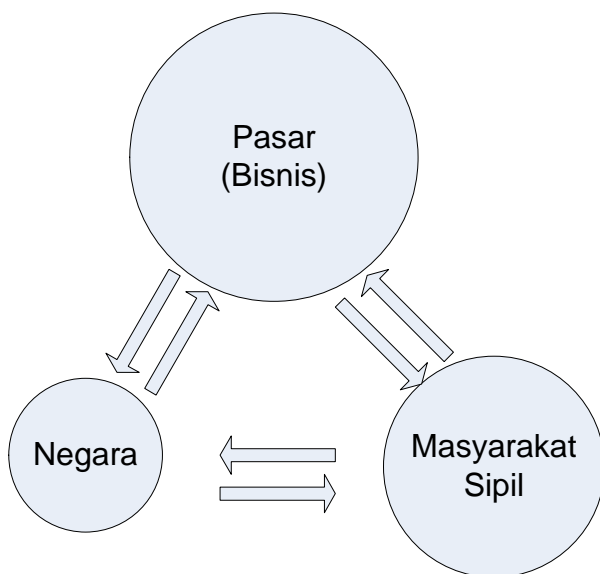
Jika liberalisme terutama dihubungkan dengan pemikiran politik yang berhubungan dengan demokrasi dan kebebasan maka neoliberal banyak ditafsirkan sebagai kembali dan menyebarnya salah satu aspek dari liberalisme klasik, yaitu liberalisme ekonomi, terutama pada aspek *laissez-faire*-nya. *Laissez faire* mengandung pengertian "*leave alone*" (biarkan sendiri). Yaitu, suatu kebijakan ekonomi yang didasarkan kepada kekuatan pasar yang tidak diregulasi untuk menghasilkan barang dan jasa. Produksi barang-barang akan menjamin pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang tinggi dan perdagangan internasional yang kompetitif (*free trade*). Dalam kebijakan sosial ia juga merujuk kepada keterlibatan negara yang minimal.<sup>4</sup>

Jadi menurut faham liberal klasik peran negara itu harus minimal, terbatas hanya untuk menjaga ketertiban umum dan pertahanan negara terhadap serangan dari luar. Liberalisme ekonomi (yang klasik) adalah suatu kepercayaan bahwa negara harus menghindari intervensi bidang ekonomi dan membiarkannya sedapat mungkin kepada individu-individu pelaku bisnis berpartisipasi dalam pasar bebas yang mampu mengatur dirinya sendiri.

Liberalisme ekonomi inilah yang sering digambarkan sebagai pendukung utama dari neoliberalisme.

Sebetulnya faham liberalisme klasik tidak pernah diterapkan sepenuhnya dalam kenyataan. Justeru di negara-negara yang menerapkan demokrasi liberal, terdapat kesadaran yang kuat bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan dari liberalisme itu sendiri negara perlu berperan aktif dalam bidang ekonomi dengan membuat regulasi bagaimana pasar bekerja. Terutama yang berhubungan dengan aspek distributif kekayaan demi terciptanya persamaan dan kebaikan hidup bermasyarakat.

Neoliberalisme adalah suatu kepercayaan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi individu, khususnya dunia usaha (bisnis), kebebasan dan hak-hak kepemilikan. Diluar ini peranan negara harus minimal. Karena itu negara harus melakukan privatisasi. Dengan privatisasi atau swastanisasi dimaksudkan adalah tindakan untuk mengurangi peran pemerintah, atau meningkatkan peranan dari sektor swasta, dalam kegiatan atau pun dalam pemilikan harta kekayaan (*assets*).<sup>5</sup> Privatisasi, menurut faham ini merupakan kunci untuk pemerintahan yang lebih baik. Faham ini juga dapat diterapkan secara internasional dalam bentuk implementasi perdagangan dan pasar bebas. Faham neoliberal sangat percaya bahwa mekanisme pasar adalah cara yang optimal dalam mengorganisir barang dan jasa. Perdagangan dan pasar bebas membebaskan potensi-potensi kreatif dan kewiraswastaan dan karena itu menuju kearah kebebasan individu dan kesejahteraan serta efisiensi dalam alokasi sumberdaya.



Gambar 2  
Hubungan antara Pasar (Bisnis) dengan Negara dan Masyarakat Sipil menurut faham neoliberal

Bahkan ada para ahli yang mengatakan bahwa neoliberal merupakan “ideologi dominan yang membentuk tatanan dunia kita sekarang”, dan bahwa kita hidup “dalam abad neoliberalisme”.<sup>6</sup> Menurut faham ini ekonomi moneter mendominasi makro ekonomi dan intervensi ekonomi negara tidak diharapkan, karena akan mengganggu logika pasar dan mengurangi efisiensi ekonomi. Faham ini mendukung perdagangan bebas secara internasional. Sebagai hasil dari implementasi dari faham ini kekayaan dan kekuasaan

tidak lagi berada di tangan pemerintah yang dipilih oleh rakyat melainkan pada kelompok-kelompok elite bisnis dan perusahaan-perusahaan multinasional.

Berbeda dengan pandangannya terhadap peran negara, faham neoliberal mengakui peran dari masyarakat sipil sebagai entitas otonom yang terpisah dari ranah ekonomi dan negara. Masyarakat sipil bekerja sebagai mekanisme solidaritas sosial dan membangun modal sosial. Kelompok-kelompok masyarakat sipil harus dibiarkan berkembang dan akan berkembang jika tidak dihalangi oleh intervensi negara.

Neoliberalisme bukanlah ideologi yang lengkap. Misalnya neoliberalism tidak berbicara tentang demokrasi, yang berarti bahwa neoliberalisme dapat diterapkan di dalam negara otoriter ataupun di negara demokrasi. Bahkan adakalanya pendukung neoliberal skeptik dengan demokrasi terutama kalau demokrasi akan menghambat dunia bisnis dan reformasi neoliberal.

### **Bisnis dan demokrasi di negara-negara demokrasi sosial (*welfare state*)**

Demokrasi sosial adalah suatu ideologi politik yang mulai berkembang sejak abad ke-19. Berbeda dengan sosialisme Marxist yang bermaksud menggantikan sistem kapitalisme dengan sosialisme secara menyeluruh melalui cara-cara yang revolusioner; faham demokrasi sosial melakukan reformasi terhadap kapitalisme untuk menghilangkan ketidakadilan yang ditimbulkannya dan berupaya mewujudkan sosialisme melalui cara-cara demokratis dan evolusi. Dengan perkataan lain demokrasi sosial dapat digambarkan sebagai gerakan ke kiri dari kapitalisme dan ke kanan dari Marxisme. Berbeda dengan Marxisme, demokrasi sosial mengakui dan menerapkan adanya ekonomi pasar, tetapi di pihak lain terdapat kepercayaan bahwa demokrasi mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dari kapitalisme yang tidak dikendalikan. Kapitalisme dapat tetap dipertahankan dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Misalnya dengan mengambil alih perusahaan-perusahaan besar menjadi perusahaan milik negara (BUMN), diselenggarakannya program-program sosial oleh negara seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, sistem jaminan sosial lainnya dan redistribusi kekayaan dengan mengenakan pajak yang tinggi atau pajak yang progresif terhadap dunia usaha.

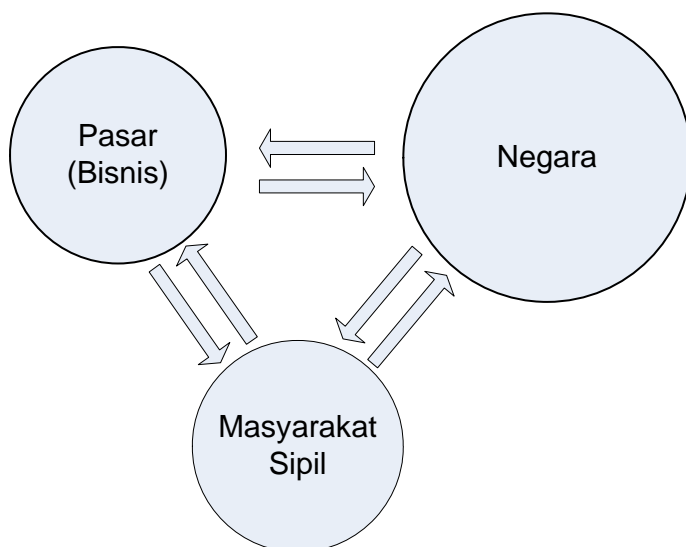
Sebagai sistem politik demokrasi sosial adalah pemerintahan yang dipimpin oleh kelas pekerja (partai buruh, partai sosialis demokrat, dan lain-lain yang serupa), tetapi bertindak tidak hanya untuk kepentingan kelas pekerja melainkan semua kelas termasuk kelas kapitalis-borjuis. Kaum kapitalis atau borjuis tidak dihapuskan melainkan dikenakan pajak untuk pelayanan yang harus diberikan kepada kelas pekerja. Demokrasi sosial juga

mengembangkan persamaan politik bagi setiap kelas untuk mencapai tujuannya. Pemerintahan demokrasi sosial bekerja mengatur agar pasar atau bisnis agar tidak berlebihan.<sup>7</sup>

Negara-negara yang menerapkan faham demokrasi sosial sering disebut sebagai “negara kesejahteraan” (*welfare state*). Negara kesejahteraan ini mengandung gagasan bahwa kesejahteraan rakyat merupakan tanggungjawab yang paling utama dari negara. Ada tiga penafsiran mengenai penerapan dari negara kesejahteraan. *Pertama*, penyediaan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat oleh negara, karena tanggungjawab utama negara adalah kesejahteraan bagi warga negaranya. *Kedua*, tanggungjawab ini bersifat komprehensif, karena semua aspek dipertimbangkan. Karena itu, tugas menyediakan “jaring pengaman” (*safety net*) atau standar pelayanan minimal saja tidak cukup. Tanggungjawab ini bersifat universal karena ia merupakan hak warga negara dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. *Ketiga*, Dalam prakteknya pelayanan ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh negara, tetapi merupakan kombinasi dari pelayanan oleh negara, atau oleh perusahaan milik negara, perusahaan swasta yang diberi subsidi atau oleh organisasi-organisasi nirlaba.<sup>8</sup>

*Adanya pelayanan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan serta serta sistem jaminan sosial lainnya yang diberikan negara merupakan elemen utama dari “negara kesejahteraan.”*

Menurut faham demokrasi sosial (baru) sebagaimana dikemukakan oleh Anthony Giddens,



negara dan masyarakat sipil harus bermitra, saling memberikan kemudahan, dan saling mengontrol. Negara mendorong pembaharuan komunitas dengan meningkatkan prakarsa lokal. Selanjutnya pemerintah melibatkan sektor ketiga, adanya perlindungan ruang publik lokal, pencegahan kejahatan dengan basis komunitas dan keluarga yang demokratis.<sup>9</sup>

*Gambar 3*  
Hubungan antara Pasar (Bisnis) dengan Negara dan Masyarakat Sipil menurut Faham Negara Kesejahteraan.

Dalam prakteknya sekarang ini faham demokrasi sosial diwujudkan dalam bidang ekonomi diwujudkan dalam berbagai kebijakan negara antara lain dalam bentuk:

- Perekonomian campuran, di mana negara aktif mengatur bisnis terutama yang berhubungan dengan kepentingan kaum buruh atau pekerja.
- Bisnis diberikan kesempatan untuk berkembang, akan tetapi beberapa aktivitas yang berhubungan dengan rakyat seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan dilakukan oleh pemerintah atau disubsidi oleh pemerintah.
- Adanya sistem jaminan sosial bagi untuk mencegah rakyat terjerumus dalam kemiskinan sebagai akibat kehilangan pekerjaan, jatuh sakit, pensiun, dan sebagainya.
- Pajak yang cukup tinggi atau pajak progresif.
- Dalam perdagangan internasional mendukung prinsip-prinsip perdagangan yang adil (*fair trade*) daripada perdagangan bebas (*free trade*).

### ***Jalan Ketiga***

Pada akhir dasawarsa 1980-an muncul gagasan tentang *The Third Way* (Jalan Ketiga) yang dimunculkan oleh Anthony Giddens seorang pembantu Tony Blair, yang pada dasarnya merupakan revisi terhadap faham demokrasi sosial lama. Jalan Ketiga tetap menempuh jalan kapitalisme seperti perekonomian campuran, di mana negara-negara tetap memberikan beberapa pelayanan dasar, akan tetapi juga melakukan beberapa privatisasi dan mengurangi regulasi terhadap dunia usaha. Peran negara yang besar ada gunanya untuk sedikit mengendalikan kerakusan para kapitalis, tetapi tidak boleh sedemikian besar sehingga melumpuhkan minat investor. Industrialisme perlu untuk mentransformasi, tetapi harus dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan faktor risiko yang ditimbulkannya.<sup>10</sup> Aliran jalan ketiga ini disebut juga dengan “kiri-tengah.”

### ***Kritik terhadap demokrasi sosial dan negara kesejahteraan***

Di antara berbagai kritik dialamatkan kepada penerapan konsep “negara kesejahteraan” adalah bahwa pelayanan sosial yang diberikan pemerintah tidak efisien. Dikemukakan bahwa pasar bebas lebih menuju ke arah produksi dan pelayanan jasa yang lebih efisien dan efektif daripada program-program kesejahteraan sosial yang langsung diselenggarakan oleh negara. Biaya sosial yang tinggi ini kemudian dibebankan kepada bisnis dengan pengenaan pajak yang tinggi. Friedrich Hayek misalnya mengatakan bahwa mekanisme pasar lebih efisien dan mampu memberikan respons terhadap keadaan yang dialami oleh masyarakat luas dibandingkan dengan negara. Kritik lain adalah bahwa negara memaksakan beban yang

berat kepada dunia bisnis yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi, sehingga terjadi pengurangan tenaga kerja yang menyebabkan meningkatnya pengangguran.

Kritik lain adalah bahwa negara demokrasi sosial kurang mampu menghadapi tantangan globalisasi. Globalisasi memaksakan adanya logika kompetisi di mana negara-bangsa tidak dapat menghindari dan harus mengurangi hambatan-hambatan pada kebijakan ekonomi nasional khususnya pada pengurangan pajak dan upah buruh untuk dapat bersaing di pasar global. Pajak serta upah buruh yang tinggi menyebabkan harga produk-produk yang dihasilkan menjadi lebih mahal dan tidak mampu bersaing secara internasional serta hilangnya minat investor untuk menanamkan modalnya.

Negara kesejahteraan juga “menderita” karena keberhasilannya sendiri. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat telah menyebabkan meningkatnya jumlah orang lanjut usia, meningkatnya permintaan akan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik serta sistem jaminan sosial yang semakin bermutu. Karena merupakan harapan rakyat bahwa kemajuan dalam masyarakat harus diikuti oleh mutu pelayanan sosial yang lebih baik. Hal ini menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan negara juga semakin membengkak.

### **Regulasi bisnis dalam rezim neoliberal dan negara kesejahteraan**

Bagaimanapun juga terjadi ketidakpuasan terhadap kesenjangan-kesenjangan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh kapitalisme bebas yang dibela oleh kaum neoliberal mau ekonomi perencanaan yang dipimpin negara.

Dengan mengambil paradigma model tiga serangkai hubungan antara negara/pemerintah, pasar/bisnis dan masyarakat sipil tersebut, ada dua pendekatan yang dipakai. Pendekatan pertama memandang bahwa relasi antara ketiga sektor tersebut positif dalam arti saling mempengaruhi untuk kebaikan bersama dan pandangan kedua melihat bahwa hubungan ketiganya bersifat konfliktual.<sup>11</sup> Pendekatan pertama disebut oleh Jude Howell dan Jenny Pearce sebagai *socially responsible capitalism* (kapitalisme yang bertanggungjawab secara sosial) sedangkan pendekatan kedua disebut dengan *alternative to capitalism* (alternatif terhadap kapitalisme). Pendekatan pertama banyak didukung oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, UNDP dan lain-lain.

### ***Kapitalisme yang bertanggungjawab secara sosial***

Pandangan ini pada dasarnya melihat bahwa ada kebutuhan terhadap intervensi negara dalam bidang ekonomi untuk menjamin standar kehidupan minimum dan regulasi negara

terhadap pasar. Faham kapitalis yang bertanggungjawab berpendapat bahwa negara minimal tidak cukup untuk melakukan regulasi yang tepat terhadap pasar serta mengentaskan dampak sosial dan ekonomi yang negatif dari pasar. Oleh karena itu negara harus aktif untuk menyediakan barang-barang kebutuhan publik yang esensial seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dasar dan upah minimum.

Sementara itu masyarakat sipil berperan membantu secara komplementer terhadap negara dan pasar sekaligus merupakan *watchdog* terhadap keduanya. Terhadap pasar misalnya melakukan advokasi agar dunia bisnis tidak meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan melakukan eksploitasi terhadap buruh serta masyarakat dan sumberdaya alam dan lingkungan sekitarnya. Antara lain dengan menuntut apa yang disebut dengan *corporate social responsibility* (tanggungjawab sosial perusahaan).

Masyarakat sipil dapat mengawasi bahwa dunia bisnis akan selalu menghormati hukum dan regulasi, meningkatkan kondisi pekerjanya, tidak terlibat dalam praktek-praktek KKN, menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, memperhatikan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup.

Faham tanggungjawab sosial perusahaan ini adalah bahwa pembangunan berkelanjutan hanya akan dapat dipertahankan kalau ada keseimbangan antara aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan harus dibangun atas dasar prinsip bahwa bisnis hanya akan dapat tumbuh subur di atas masyarakat yang relatif sejahtera dan ketersediaan sumberdaya alam. Karena itu bisnis perlu menyeimbangkan antara aspek ekonomi berupa mencari keuntungan dengan pembangunan sosial dan lingkungan hidup singkatnya bisnis harus memperhatikan apa yang disebut dengan *triple bottom line*, yaitu *profit* (keuntungan, laba), *people* (rakyat) dan *planet* (bumi atau lingkungan hidup). Hal ini perlu dilakukan oleh dunia bisnis melalui kegiatan-kegiatan filantropi perusahaan dan investasi sosial seperti membantu masyarakat sekitarnya dalam bidang pendidikan, kesejahteraan, usaha kecil dan menengah (UKM), perlindungan lingkungan hidup, dan sebagainya.

Di Indonesia, misalnya, undang-undang mengenai perseroan terbatas yang baru saja disahkan oleh DPR (16 Juli 2007) misalnya mewajibkan perusahaan menyediakan dana untuk pelaksanaan tanggungjawab sosialnya. Perusahaan yang bergerak di bidang/berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

### ***Alternatif terhadap kapitalisme***

Kalau faham kapitalisme yang bertanggungjawab secara sosial merupakan faham yang *mainstream*, maka pendekatan alternatif terhadap kapitalisme terutama didukung oleh kalangan gerakan sosial, aktivis akar rumput serta kalangan LSM yang menantang konstruksi dominan dari pembangunan. Pendekatan ini melihat bahwa relasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah dan bisnis bagaimanapun juga mengandung potensi konflik. Meskipun pada dasarnya kelompok-kelompok ini mempunyai kesamaan pandangan mengenai keadilan sosial, persamaan dan keberlanjutan lingkungan hidup serta kecenderungan negara dan pasar yang menindas. Respons terutama terhadap kecenderungan pasar yang menindas tersebut dalam bentuk pengembangan alternatif ekonomi seperti, perdagangan yang adil, saling membantu, koperasi produsen dan konsumen, sistem produksi yang didasarkan kepada teknologi ramah lingkungan sampai kepada kembali kepada ekonomi subsisten. Akan tetapi sampai sekarang belum ada visi bersama tentang apa yang disebut dengan “kehidupan yang baik” tersebut.<sup>12</sup>

### **Beberapa Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di negara-negara yang menganut faham demokrasi, apakah itu atas nama faham neoliberal atau demokrasi sosial, negara sedikit banyak tetap melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar dan kehidupan bisnis atau dunia usaha. Intervensi ini dilakukan melalui regulasi atau peraturan perundang-undangan. Regulasi yang dikeluarkan adakalanya menguntungkan dunia usaha tetapi dipandang merugikan bagi kepentingan rakyat. Seperti adanya privatisasi sejumlah perusahaan-perusahaan negarayang vital untuk kepentingan rakyat. Di pihak lain bisnis atau dunia usaha akan memberikan reaksi apabila suatu regulasi akan merugikan atau membebani kaum bisnis. Pengalaman Indonesia dewasa ini misalnya dengan jelas terlihat bagaimana kaum bisnis dan masyarakat sipil bereaksi terhadap undang-undang. Untuk menyebutkan beberapa diantaranya antara lain seperti undang-undang tentang pengelolaan sumberdaya air, revisi undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang tentang penanaman modal, undang-undang tentang perseroan terbatas, undang-undang tentang perpajakan dan sebagainya. Ke arah mana undang-undang tersebut menguntungkan, apakah lebih memihak kepentingan bisnis ataukah lebih memihak kesejahteraan rakyat, itulah pertanyaannya? Dalam hal ini demokrasi mengupayakan pemerintah dan bisnis dapat bekerjasama untuk kepentingan yang lebih besar. Yaitu, meningkatnya kebebasan sipil dan standar kehidupan masyarakat.

## Tugas

**Anda diminta untuk membuat makalah singkat 4 sd 5 halaman satu spasi mengenai kebijakan negara, termasuk pemerintah daerah yang memihak bisnis (pro bisnis) atau merugikan kepentingan masyarakat sipil. Berikan contoh-contoh dan analisisnya.**

---

<sup>1</sup>Makalah yang disusun sebagai pengantar untuk memulai pembahasan modul “Bisnis dan Demokrasi” dalam Sekolah Demokrasi yang diselenggarakan oleh Yayasan Melania, Jeneponto, 29 Juli 2007.

<sup>2</sup> Bob Edwards, *Beyond Tocqueville: Civil Society and Social Capital Debate in Comparative Perspective*, (Hanover: University Press of New England, 1998), hal. 10.

<sup>3</sup>Dag Einar Thorsen dan Amund Lie, “What is Neoliberalism”, Department of Political Science, University of Oslo, makalah, 2006. hal.2

<sup>4</sup>Eric Evans, “Laissez-Faire and the Victorian”, BBC Homepage.

<sup>5</sup>Lihat E.S.Savas, *Privatization: the key for better government*, (Chatham, New Jersey: Chatham House Publishers, 1987), hal.3.

<sup>6</sup>Dag Einar Thorsen dan Amund Lie, “What Is Neoliberalism”, hal. 2

<sup>7</sup>“Social Democracy, No Future? Introduction on articles on the retreat of social democracy”, hal.1.

<sup>8</sup>Lihat misalnya *The Wikipedia, the free encyclopedia*.

<sup>9</sup>Dikutip dari terjemahan *The Third Way* yang berjudul Anthony Giddens, *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 91. Penerjemah buku ini menggunakan terminologi masyarakat madani sebagai terjemahan *civil society*. Penulis menggunakan istilah masyarakat sipil.

<sup>10</sup>I. Wibowo dalam “Kata Pengantar” dalam buku terjemahan *The Third Way* yang berjudul Anthony Giddens, *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. xix-xx.

<sup>11</sup>Jude Howell dan Jenny Pearce, *Civil Society and Development: A Critical Exploration*, (London: Lynne Rienner Publishers, 2001), hal.64.

<sup>12</sup>Jude Howell dan Jenny Pearce, *op.cit.*